



ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI INSTRUMEN BIOPOLITIK: TELAAH TEORITIS DALAM KONTEKS DUKCAPIL KOTA BANDUNG

Nunung Munawaroh

Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Email: nunung_m@ipdn.ac.id

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis konseptual dan kritis terhadap teori biopolitik Michel Foucault, governmentality, serta literatur administrasi kependudukan dan tata kelola digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif teknis, melainkan menjadi teknologi kekuasaan yang mengelola kehidupan populasi melalui proses klasifikasi, pencatatan, normalisasi, dan integrasi data. Melalui NIK, KTP-el, dan sistem digital terintegrasi, negara membentuk relasi baru dengan warga yang berbasis pada validitas data dan akses layanan publik. Dalam konteks Kota Bandung sebagai kota berbasis smart city, digitalisasi DUKCAPIL memperkuat praktik governmentality, di mana warga secara sukarela menyesuaikan diri dengan standar administratif negara demi memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa kewarganegaraan mengalami transformasi dari status hukum menjadi konstruksi administratif berbasis data, sehingga memunculkan risiko eksklusi terhadap warga yang tidak tercatat atau tidak tervalidasi dalam sistem. Dengan demikian, administrasi kependudukan di era digital merepresentasikan bentuk biopolitik kontemporer yang bekerja secara halus namun efektif dalam membentuk subjektivitas warga dan memperluas kapasitas kontrol negara terhadap populasi.

Kata Kunci: biopolitik, administrasi kependudukan, DUKCAPIL, governmentality, smart city

Abstract

This study aims to analyze population administration as an instrument of biopolitics in the context of the Department of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) of Bandung City. The research employs a qualitative approach using a library research method through conceptual and critical analysis of Michel Foucault's theory of biopolitics, governmentality, and literature on population administration and digital governance. The findings reveal that population administration no longer functions merely as a technical administrative mechanism, but also as a technology of power that manages population life through classification, registration, normalization, and data integration processes. Through the implementation of the National Identification Number (NIK), electronic identity cards (KTP-el), and integrated digital systems, the state constructs a new relationship with citizens based on data validity and access to public services. In the context of Bandung as a smart city, the digitalization of DUKCAPIL strengthens practices of governmentality, where citizens voluntarily conform to administrative standards in order to gain recognition and access to social rights. The study also finds that citizenship has shifted from a legal status into a data-based administrative construction, creating risks of exclusion for individuals who are unregistered or invalidated within the system. Therefore, digital population administration represents a contemporary form of biopolitics that operates subtly yet effectively in shaping citizen subjectivity and expanding state control over the population.

Keywords: *biopolitics, population administration, DUKCAPIL, governmentality, smart city*

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan negara modern, peran negara mengalami pergeseran paradigmatis yang mendalam dan kompleks (Kusuma, 2026). Negara tidak lagi sekadar berfungsi sebagai “penguasa wilayah” (*territorial sovereign*) yang menegaskan kekuasaan melalui monopoli kekerasan atas ruang geografis, melainkan bertransformasi menjadi “pengelola kehidupan warga” (*manager of life*) (Yar’Adua, 2023).

Transformasi ini menandai lahirnya apa yang oleh Michel Foucault disebut sebagai *biopolitik* sebuah bentuk kekuasaan yang beroperasi bukan pada kematian, melainkan pada pengelolaan kehidupan secara kolektif (*bios*) (Septianno, 2025). Administrasi kependudukan, dalam kerangka ini, bukan lagi sekadar prosedur administratif teknis semata, melainkan instrumen strategis pengelolaan populasi (Putri, 2026) (Riaji, 2026). Melalui mekanisme pencatatan data, identitas, statistik, dan pengawasan rutin, negara modern mampu “membuat hidup dapat dihitung, diukur, dan diatur”. Dengan demikian, administrasi kependudukan menjadi salah satu arena utama di mana kekuasaan biopolitik beroperasi: mengklasifikasikan, memantau, dan mengoptimalkan kehidupan warga negara sebagai sumber daya biologis, sosial, dan ekonomi (Wardhana, 2024).

Pada satu sisi, praktik biopolitik ini membawa manfaat yang signifikan bagi negara modern. Administrasi

kependudukan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendistribusikan sumber daya secara efisien, meningkatkan pelayanan publik, serta merespons krisis kesehatan dan sosial dengan lebih cepat. Data kependudukan yang akurat menjadi fondasi bagi program-program kesejahteraan, pencegahan penyakit, perencanaan kota, dan pembangunan ekonomi. Potensi biopolitik bahkan semakin besar di era digital, di mana integrasi data *real-time* dan teknologi identitas digital (seperti NIK dan IKD) dapat menciptakan *smart governance* yang responsif, inklusif, dan berbasis bukti. Namun, di balik manfaat tersebut, biopolitik juga menyimpan potensi kekuasaan yang lebih halus dan mendalam, yaitu kemampuan negara untuk tidak hanya mengelola, tetapi juga membentuk, mengarahkan, dan pada tingkat tertentu mengendalikan kehidupan warga melalui kategorisasi, normalisasi, serta mekanisme inklusi dan eksklusi administratif. Oleh karena itu, telaah kritis terhadap dimensi biopolitik administrasi kependudukan menjadi sangat penting agar manfaat efisiensi dan pelayanan tidak menutupi risiko penguatan kekuasaan negara atas tubuh dan identitas individu.

Meskipun literatur tentang administrasi kependudukan di Indonesia telah berkembang cukup pesat, mayoritas kajian masih terjebak dalam kerangka fungsionalis dan teknokratis. Penelitian-penelitian

tersebut umumnya memposisikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) sebagai penyedia pelayanan publik, inovasi digital, atau instrumen reformasi birokrasi dalam konteks *e-government* dan *single identity number*. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan dimensi kekuasaan yang inheren di balik praktik pencatatan kependudukan. Jarang sekali ditemukan telaah yang secara eksplisit memahami administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik yakni sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk, mengatur, dan mengendalikan tubuh serta identitas warga negara. Akibatnya, terdapat kekosongan kajian konseptual yang signifikan: belum banyak yang mengaitkan praktik DUKCAPIL dengan teori biopolitik Foucault dan turunannya (seperti *governmentality* dan *biopower*). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan telaah teoritis yang kritis.

Di Indonesia, administrasi kependudukan memegang peranan sentral dalam infrastruktur kenegaraan kontemporer (Nampa, 2025). Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan sekadar dokumen identitas, melainkan “paspor administratif” yang menjadi prasyarat mutlak bagi warga untuk mengakses berbagai layanan negara mulai dari bantuan sosial (bansos), program kesehatan nasional, pendidikan, hingga partisipasi dalam pemilu. Integrasi data

kependudukan ke dalam berbagai *platform* digital nasional semakin menegaskan bahwa data populasi telah menjadi tulang punggung pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*) (Rahmadana, 2025).

Dalam skala lokal, Kota Bandung menawarkan konteks yang sangat relevan. Sebagai salah satu kota yang secara konsisten mempromosikan narasi *digital governance* dan *smart city*, Bandung telah menjadikan DUKCAPIL sebagai garda depan pengelolaan identitas administratif warga. Melalui berbagai inovasi layanan daring dan integrasi sistem informasi, DUKCAPIL Kota Bandung tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat jaringan pengawasan dan pengelolaan populasi secara real-time. Kota ini, dengan demikian, menjadi laboratorium ideal untuk menelaah bagaimana praktik biopolitik beroperasi dalam konteks pemerintahan kota yang “modern” dan “progresif”.

Praktik biopolitik melalui administrasi kependudukan bukanlah fenomena unik di Kota Bandung, melainkan muncul dalam berbagai bentuk di berbagai kota sesuai konteks politik-ekonomi masing-masing. Untuk memperjelas posisi Bandung dalam spektrum global dan nasional, berikut perbandingan dengan beberapa kota lain:

Tabel 1. Perbandingan Praktik Biopolitik melalui Administrasi Kependudukan di Berbagai Kota

Kota / Negara	Sistem Utama	Karakter Biopolitik	Tingkat Digitalisasi & Kontrol	Eksklusi & Implikasi terhadap Warga
Bandung, Indonesia	DUKCAPIL (NIK, KTP-el, IKD)	<i>Enabling + Regulatory</i> : memfasilitasi akses layanan sekaligus pengawasan identitas	Tinggi (smart city, layanan daring)	Eksklusi ringan bagi yang tidak terdata; mendukung narasi inklusif digital
Jakarta, Indonesia	JAKI & integrasi data kependudukan	Digital governmentality: pengelolaan real-time (lalu lintas, banjir, kesehatan)	Sangat tinggi	Pengawasan partisipatif; risiko surveillance meningkat
Samarinda, Indonesia	Program KB & data kependudukan	Klasik biopolitik populasi: regulasi fertilitas dan tubuh reproduksi	Sedang	Intervensi langsung pada tubuh; fokus keseimbangan populasi-sumber daya
Beijing/Shanghai, China	Sistem Hukou	Rigid discipline + regulation: pembagian urban-rural	Sedang-tinggi (sentralistis)	Eksklusi kuat bagi migran rural (warga kelas dua); batasi akses pendidikan & kesehatan
Mumbai/Delhi, India	Aadhaar (biometric 12-digit)	Biometrik massal untuk distribusi bansos & layanan	Sangat tinggi	Risiko eksklusi digital tinggi; kontroversi privasi & surveillance
Singapore	Smart Nation Initiative	Algorithmic governmentality: self-governance melalui insentif data	Sangat tinggi (AI & sensor)	Pengawasan halus & total; efisiensi tinggi, dikritik sebagai otoritarianisme lembut

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa praktik administrasi kependudukan di berbagai kota dan negara tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai mekanisme teknis pelayanan publik, melainkan sebagai bagian dari konfigurasi biopolitik yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan teknologi masing-masing. Dalam konteks Kota Bandung, sistem DUKCAPIL berbasis NIK, KTP-el, dan IKD menunjukkan karakter *enabling* sekaligus *regulatory*, di mana negara tidak hanya memfasilitasi akses layanan, tetapi juga secara halus

mengawasi dan menstrukturkan identitas warga melalui integrasi data digital. Hal ini kontras namun juga paralel dengan Jakarta yang melalui platform JAKI mencerminkan bentuk *digital governmentality*, yakni pengelolaan kehidupan warga secara real-time berbasis data, yang memperkuat efisiensi sekaligus membuka ruang bagi peningkatan pengawasan partisipatif.

Sementara itu, di Samarinda, pendekatan biopolitik masih cenderung klasik melalui program keluarga berencana yang berfokus

pada regulasi tubuh dan fertilitas, menunjukkan bahwa biopolitik tidak selalu identik dengan digitalisasi tinggi, melainkan juga dapat hadir dalam bentuk intervensi langsung terhadap aspek biologis populasi. Di tingkat global, sistem Hukou di Beijing dan Shanghai merepresentasikan bentuk biopolitik yang lebih rigid dan disipliner, di mana klasifikasi administratif secara tegas menentukan akses warga terhadap layanan dasar, sehingga menghasilkan eksklusi struktural bagi kelompok tertentu, khususnya migran rural. Berbeda lagi dengan India melalui sistem Aadhaar di Mumbai dan Delhi, yang mengandalkan biometrik massal sebagai basis distribusi layanan sosial; di sini, tingkat digitalisasi yang sangat tinggi justru menghadirkan paradoks berupa potensi eksklusi digital dan problem privasi.

Adapun Singapore menampilkan bentuk paling mutakhir melalui inisiatif *Smart Nation*, di mana biopolitik bertransformasi menjadi *algorithmic governmentality* suatu mekanisme pengelolaan warga berbasis data, sensor, dan kecerdasan buatan yang mendorong *self-governance*. Dalam kerangka ini, kontrol tidak lagi tampak sebagai paksaan, melainkan hadir secara halus melalui insentif dan efisiensi sistem. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa administrasi kependudukan di berbagai wilayah bergerak dalam spektrum yang sama yakni pengelolaan kehidupan warga oleh negara namun dengan variasi intensitas digitalisasi, bentuk kontrol, dan tingkat eksklusi

yang berbeda, sebagaimana telah lama dikonsepsikan dalam pemikiran Michel Foucault tentang relasi antara kekuasaan, tubuh, dan populasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama sekaligus, yaitu bagaimana administrasi kependudukan dapat dipahami sebagai praktik biopolitik dalam kerangka teori Foucault dan pemikiran pasca-Foucauldian, bagaimana relasi negara-warga terbentuk dan direproduksi melalui mekanisme administrasi kependudukan di DUKCAPIL Kota Bandung, serta apa implikasi konseptual dari praktik biopolitik tersebut terhadap pemahaman kewarganegaraan, hak, dan subjektivitas warga negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik dengan menggunakan perspektif teoritis Foucault yang menandai pergeseran historis dari kekuasaan kedaulatan (*sovereign power*) yang berhak “membuat mati dan membiarkan hidup” menjadi biopower yang berfungsi “membuat hidup dan membiarkan mati”, di mana negara tidak lagi hanya menguasai wilayah melainkan mengelola kehidupan populasi secara keseluruhan melalui teknik statistik, data identitas, dan regulasi demografis serta pemikiran kontemporer terkait *governmentality* sebagai “konduksi konduksi” perilaku warga.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*)

yang selama ini masih sangat terbatas, di mana mayoritas studi tentang DUKCAPIL hanya berfokus pada aspek pelayanan publik dan inovasi digital, sedangkan dimensi kekuasaan biopolitik atas tubuh dan identitas warga jarang disentuh secara mendalam. *Novelty* penelitian ini terletak pada telaah teoritis kritis pertama yang secara spesifik mengaitkan praktik DUKCAPIL Kota Bandung sebagai laboratorium smart city dengan kerangka biopolitik Foucault, sehingga mampu memberikan kontribusi konseptual baru terhadap diskursus kewarganegaraan dengan memperlihatkan bagaimana praktik administratif sehari-hari secara halus membentuk subjektivitas dan hak warga dalam negara biopolitik kontemporer. Dengan pendekatan telaah teoritis yang mendalam, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian administrasi publik dan ilmu politik, tetapi juga memberikan kerangka kritis baru dalam memahami dinamika kekuasaan di era pemerintahan berbasis data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian teoritis yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) (Subagiya, 2023). Karena tujuannya adalah telaah konseptual mendalam, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan melainkan sepenuhnya berbasis pada analisis dokumen dan literatur sekunder (Marlina, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan dialog kritis antara

teori biopolitik Foucault dengan praktik administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya DUKCAPIL Kota Bandung, tanpa terikat pada pembuktian empiris.

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis konseptual dan analisis kritis (Waruwu, 2025). Analisis konseptual bertujuan untuk menguraikan, mendefinisikan, dan membangun hubungan antar konsep-konsep kunci seperti biopolitik, biopower, *governmentality*, identitas administratif, serta subjektivitas warga (Istiqomah, 2025). Sementara itu, analisis kritis digunakan untuk membongkar relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik mekanisme pencatatan kependudukan. Seluruh proses analisis berpijak pada pemikiran Michel Foucault, terutama konsep biopolitik dan *governmentality*, serta dikembangkan dengan pemikiran pasca-Foucauldian yang relevan untuk memperkaya perspektif teoritis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi teoritis dan kontekstual (Nurhayati, 2024). Sumber utama meliputi buku-buku teori politik dan filsafat, khususnya karya primer Michel Foucault seperti *Society Must Be Defended*, *The History of Sexuality Volume 1*, dan *Security, Territory, Population*, serta pemikiran pasca-Foucauldian dari Agamben, Rose, dan Miller. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan jurnal ilmiah bidang administrasi publik, ilmu politik, dan studi kependudukan baik nasional maupun internasional, regulasi resmi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan turunannya, serta dokumen resmi DUKCAPIL Kota Bandung dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan pelengkap ilustratif, bukan sebagai objek utama penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur akademik secara sistematis (Sabrina, 2026). Proses ini mencakup pencarian artikel jurnal melalui berbagai database akademik, pengunduhan dokumen regulasi dari situs resmi pemerintah, serta pembacaan mendalam terhadap teks-teks primer Foucault dengan menggunakan kata kunci seperti *"biopolitik"*, *"governmentality"*, *"administrasi kependudukan"*, *"DUKCAPIL"*, dan *"smart city governance"*.

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap melalui empat langkah utama. Pertama, reduksi konsep dengan menyeleksi dan menyaring teori-teori yang paling relevan. Kedua, kategorisasi konsep dengan mengelompokkan ide-ide pokok seperti biopolitik, kekuasaan, dan identitas administratif untuk membentuk kerangka analisis. Ketiga, interpretasi kritis yang menghubungkan konsep teori dengan

praktik DUKCAPIL Kota Bandung secara dialektis. Keempat, sintesis argumentatif yang menyusun argumen utama penelitian secara koheren dan menghasilkan kontribusi konseptual baru (Haramain, 2026). Penelitian ini secara tegas tidak bertujuan menguji temuan empiris atau menghasilkan data lapangan, melainkan membangun pemahaman konseptual yang kritis dan mendalam tentang administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik. Validitas penelitian diukur dari kedalaman analisis teoritis, konsistensi argumen, serta relevansi kontribusi konseptual terhadap diskursus ilmu politik dan administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Kependudukan Sebagai Manifestasi Biopolitik Digital

Dalam diskursus kekuasaan modern, Biopolitik merupakan pergeseran paradigma kekuasaan dari hak untuk "mematikan" menjadi teknologi untuk "mengelola kehidupan" populasi (Foucault, 1978). Di sini, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui represi fisik, melainkan melalui *Governmentality* sebuah seni memerintah di mana negara mengatur warga tanpa paksaan langsung. Kekuasaan ini bekerja secara subtil melalui tiga mekanisme utama:

Tabel 2. Mekanisme Biopolitik dalam Administrasi Kependudukan

Konsep Biopolitik	Definisi Teoritis	Bentuk dalam Administrasi Kependudukan	Operasional dalam DUKCAPIL Kota Bandung	Dampak terhadap Warga	Implikasi Kritis
Klasifikasi	Proses pengelompokan	Pengelompokan berdasarkan	Data NIK dan KTP-el	Warga diposisikan	Potensi reduksi kompleksitas

	populasi ke dalam kategori tertentu sebagai dasar pengelolaan oleh negara	usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, dll	mengkategorikan warga dalam sistem database terintegrasi	sebagai bagian dari kategori administratif, bukan individu unik	identitas manusia menjadi kategori teknokratis
Pencatatan	Transformasi kehidupan biologis menjadi data statistik yang dapat diukur, dianalisis, dan dikendalikan	Registrasi kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan status	Sistem digital DUKCAPIL mencatat seluruh siklus hidup warga dalam basis data nasional	Eksistensi warga menjadi tergantung pada keberadaan dalam sistem data	Warga yang tidak tercatat berpotensi “tidak terlihat” oleh negara (<i>administrative invisibility</i>)
Normalisasi	Penetapan standar perilaku dan identitas yang dianggap “normal” atau “ideal” oleh negara	Penetapan kewajiban administratif (memiliki KTP, KK, kepatuhan pelaporan data)	Warga dianggap “tertib” jika terdaftar dan datanya valid dalam sistem	Mendorong kepatuhan administratif sebagai syarat akses layanan publik	Menggeser makna kewarganegaraan dari hak menjadi kepatuhan terhadap sistem

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2026

Pembahasan lanjutan menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme pencatatan teknis, melainkan sebagai instrumen yang secara aktif mendefinisikan keberadaan warga negara. Melalui pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), negara tidak hanya mengidentifikasi individu, tetapi juga menetapkan siapa yang “ada” dalam kerangka politik dan administratif. Dalam hal ini, keberadaan biologis seseorang tidak otomatis menjamin eksistensi politiknya; seseorang baru benar-benar diakui ketika terdaftar dalam sistem administrasi negara. Tanpa keterdaftaran tersebut, individu berpotensi mengalami *administrative invisibility* atau bahkan *social death*, yakni kondisi di mana ia hidup secara

biologis, tetapi tidak memiliki akses terhadap layanan publik karena tidak terbaca dalam sistem.

Lebih jauh, praktik administrasi kependudukan juga mencerminkan proses transformasi kehidupan manusia menjadi data yang terukur. Pencatatan kelahiran, kematian, dan perubahan status sipil merupakan bentuk konkret bagaimana tubuh biologis diterjemahkan menjadi entitas statistik yang dapat dianalisis dan dikelola. Dalam perspektif Michel Foucault, hal ini menegaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pengelolaan populasi, bukan sekadar melalui hukum atau kekerasan. Individu tidak lagi hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi sebagai bagian dari populasi yang diatur melalui angka, kategori, dan distribusi data.

Dalam perkembangan kontemporer, biopolitik ini mengalami pergeseran penting menuju bentuk yang lebih halus, yakni dari kontrol eksternal menuju regulasi diri berbasis data. Warga secara sukarela memperbarui dan menyerahkan data pribadinya demi memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik. Proses ini menciptakan mekanisme *self-regulation*, di mana kepatuhan tidak lagi dipaksakan secara langsung, melainkan diinternalisasi oleh warga sebagai kebutuhan. Digitalisasi administrasi kependudukan juga melahirkan bentuk pengawasan baru yang bersifat tidak kasat mata (*surveillance halus*), di mana validasi data dan integrasi sistem menjadi alat utama dalam menentukan akses terhadap hak-hak dasar, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Dalam konteks Kota Bandung, implementasi administrasi kependudukan melalui Disdukcapil menunjukkan intensifikasi biopolitik yang signifikan. Integrasi NIK dengan berbagai layanan publik dan penggunaan *platform* digital tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan negara terhadap populasi. Ketergantungan warga terhadap sistem ini menciptakan kondisi di mana individu harus senantiasa memastikan bahwa data mereka valid dan terbaru agar tetap diakui sebagai subjek yang sah. Dengan demikian, relasi antara negara dan warga tidak lagi bersifat koersif, melainkan berbasis pada mekanisme administratif dan

teknokratis yang mengondisikan kepatuhan sebagai prasyarat akses.

Implikasi konseptual dari praktik ini sangat mendalam. Kewarganegaraan tidak lagi hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi juga sebagai konstruksi administratif yang bergantung pada keterdaftaran dalam sistem data. Hak-hak warga menjadi bersyarat dan terikat pada validitas identitas digital, sementara subjektivitas warga mengalami transformasi menjadi *data subject*, yakni individu yang didefinisikan dan dikenali melalui representasi digitalnya. Dengan demikian, administrasi kependudukan di Kota Bandung memperlihatkan bagaimana biopolitik kontemporer bekerja melalui mekanisme yang halus namun sistematis, membentuk identitas, mengarahkan perilaku, dan memastikan bahwa kehidupan warga tetap berada dalam jangkauan pengelolaan negara yang tidak selalu terlihat, tetapi terus beroperasi secara efektif.

Rekonstruksi Relasi Negara-Warga Dalam Ruang Administratif

Dalam kacamata konvensional, relasi ini sering dipandang sebagai dikotomi statis: Negara sebagai aktor pemegang otoritas yang mengatur, dan Warga sebagai subjek pasif yang diatur. Namun, dalam kerangka biopolitik, relasi ini bersifat lebih sirkular dan mendalam. Warga tidak hanya tunduk pada regulasi, tetapi juga "ikut menginternalisasi" sistem tersebut. Kesadaran untuk memiliki identitas resmi (KTP/NIK) menjadi bagian dari

identitas personal warga, di mana mereka merasa "tidak lengkap" atau "tidak sah" tanpa pengakuan administratif dari negara. Relasi ini

terbentuk melalui rantai mekanisme logis yang mengikat individu ke dalam struktur kekuasaan negara:

Tabel 3. Mekanisme Relasi Negara-Warga dalam Administrasi Kependudukan

Mekanisme Biopolitik	Proses Kunci	Makna Konseptual	Manifestasi dalam Administrasi Kependudukan	Dampak terhadap Warga	Implikasi Kritis
Registrasi → Legitimasi	Pendaftaran kelahiran, domisili, dan status sipil	Legitimasi politik warga ditentukan melalui pengakuan administratif	Sistem pencatatan sipil sebagai pintu masuk pengakuan negara	Warga yang terdaftar diakui sebagai bagian sah dari populasi	Eksistensi politik bergantung pada sistem, bukan semata keberadaan biologis
Identifikasi → Akses	Pemberian dan validasi NIK sebagai identitas tunggal	Identitas menjadi prasyarat utama untuk mengakses hak	NIK sebagai "kunci" untuk layanan publik (kesehatan, pendidikan, bansos)	Warga tanpa identitas valid kehilangan akses layanan	Hak bergeser dari hak melekat menjadi hak berbasis data
Integrasi Data → Ketergantungan	Konektivitas data lintas sektor (perbankan, kesehatan, transportasi)	Terbentuk ketergantungan sistemik antara warga dan negara	Integrasi NIK dengan berbagai layanan publik dan privat	Warga terdorong menjaga validitas data demi keberlangsungan hidup	Muncul relasi ketergantungan yang memperkuat kontrol negara secara tidak langsung

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2026

Melanjutkan uraian sebelumnya, relasi negara-warga dalam administrasi kependudukan menunjukkan pergeseran mendasar dari pola koersif menuju bentuk yang lebih teknokratis dan berbasis data. Dalam kerangka ini, negara tidak lagi bergantung pada paksaan fisik atau instrumen kekerasan untuk memastikan kepatuhan, melainkan membangun sistem administratif yang secara struktural mensyaratkan kepatuhan tersebut. Kepatuhan tidak dipaksakan dari luar, tetapi muncul sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan warga untuk mengakses layanan sosial dan ekonomi.

Dengan kata lain, akses terhadap hak-hak dasar kini dimediasi oleh validitas data; ketika data tidak sesuai atau tidak terdaftar, maka individu secara otomatis terpinggirkan dari sistem. Pola ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault mengenai transformasi kekuasaan modern yang bekerja melalui mekanisme halus, administratif, dan terinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks Kota Bandung, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi

sangat sentral sebagai *gatekeeper* identitas. Institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penentu validitas eksistensi administratif warga. Ketergantungan warga terhadap sistem Disdukcapil menunjukkan bahwa eksistensi administratif menjadi sesuatu yang harus terus dijaga dan diperbarui. Melalui digitalisasi layanan, relasi ini semakin terotomatisasi, di mana warga didorong untuk secara mandiri mengelola dan memperbarui datanya (*self-service*). Namun, kemandirian ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari pengawasan diri (*self-regulation*), di mana individu secara sukarela menyesuaikan dirinya dengan standar yang telah ditetapkan oleh sistem birokrasi.

Dengan demikian, relasi negara-warga di Kota Bandung dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial baru yang termediasi oleh teknologi. Negara tidak lagi mengatur melalui paksaan langsung, tetapi melalui pengelolaan akses dan integrasi data, sementara warga menukar data pribadinya dengan kemudahan layanan yang ditawarkan. Relasi ini menciptakan ketergantungan teknokratis yang membuat mekanisme biopolitik bekerja secara efisien, nyaris tanpa gesekan yang terlihat, namun tetap memiliki daya kontrol yang kuat terhadap kehidupan sosial warga.

Implikasi Biopolitik terhadap Kewarganegaraan dan Subjektivitas Data

A. Redefinisi Kewarganegaraan: Antara Legalitas dan Substantivitas

Dalam perspektif biopolitik, kewarganegaraan tidak lagi dapat dipahami sebagai kategori tunggal yang stabil, melainkan sebagai arena ketegangan antara dimensi legal (formal) dan substantif (praktis). Administrasi kependudukan melalui DUKCAPIL secara sistematis memperkuat kewarganegaraan legal melalui proses kodifikasi identitas seperti NIK dan KTP-el. Kodifikasi ini memungkinkan negara untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengelola populasi secara efisien. Namun demikian, keberhasilan dalam aspek administratif tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan terpenuhinya kewarganegaraan substantif, yaitu kemampuan warga untuk benar-benar mengakses hak, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperoleh perlindungan negara secara nyata.

Dalam kerangka ini, kewarganegaraan mengalami proses “kodifikasi”, di mana status sebagai warga negara tidak lagi ditentukan oleh keterlibatan politik atau relasi sosial, melainkan oleh validitas data dalam sistem negara. Argumen ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi negara dari pengelolaan aspirasi warga menuju pengelolaan data warga. Dengan kata lain, negara modern cenderung lebih responsif terhadap keberadaan data dibandingkan terhadap suara warga itu sendiri, sehingga relasi kewarganegaraan menjadi semakin

teknokratis dan tereduksi secara administratif.

B. Hak sebagai Komoditas Administratif: Risiko Eksklusi Berbasis Data

Implikasi lanjutan dari proses tersebut adalah transformasi sifat hak dari sesuatu yang bersifat melekat dan universal menjadi sesuatu yang bersyarat secara administratif. Hak-hak dasar seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial kini sangat bergantung pada keberadaan dan validitas data dalam sistem kependudukan. Dalam kondisi ini, hak tidak lagi hadir sebagai prinsip normatif yang dijamin negara, melainkan sebagai entitas yang “diaktifkan” melalui verifikasi administratif.

Konsekuensinya adalah munculnya potensi eksklusi berbasis data, di mana individu atau kelompok yang tidak terakomodasi dalam sistem administrasi kependudukan berisiko kehilangan akses terhadap hak-hak tersebut. Kelompok seperti tunawisma, masyarakat adat, atau individu dengan mobilitas tinggi menjadi rentan terhadap apa yang dapat disebut sebagai “eksistensi tanpa pengakuan”. Dalam perspektif biopolitik yang dikemukakan oleh Michel Foucault, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui penindasan langsung, melainkan melalui mekanisme seleksi administratif yang menentukan siapa yang “layak” untuk dilayani oleh negara. Dengan demikian, eksklusi tidak terjadi melalui penghapusan fisik, tetapi melalui pengabaian sistemik.

C. Transformasi Subjektivitas: Lahirnya “Administrative Subject”

Lebih jauh, administrasi kependudukan tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada dimensi subjektivitas individu. Dalam konteks ini, warga negara tidak lagi semata-mata dipahami sebagai subjek otonom yang memiliki identitas unik, melainkan sebagai “data subject” atau “administrative subject” yang keberadaannya ditentukan oleh sistem. Identitas individu direduksi menjadi sekumpulan variabel administratif seperti status perkawinan, pekerjaan, dan atribut demografis lainnya yang tersimpan dalam basis data negara.

Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam konstruksi diri, di mana individu mulai memahami dirinya melalui representasi administratif yang dimiliki. Subjektivitas tidak lagi dibentuk secara organik melalui pengalaman sosial dan pilihan moral, melainkan dikonstruksi secara sistemik oleh mekanisme pencatatan dan klasifikasi. Dalam kondisi ekstrem, ketika data individu dinyatakan tidak valid, maka identitas sosialnya pun dapat dipertanyakan, meskipun secara biologis ia tetap eksis. Hal ini mencerminkan bentuk alienasi baru dalam masyarakat modern, di mana keberadaan manusia dipisahkan dari pengalaman hidupnya dan digantikan oleh validitas digitalnya.

D. Konteks Indonesia: Menuju *Data-Centric Governance*

Perkembangan ini menemukan relevansinya dalam konteks Indonesia yang tengah bergerak menuju *data-*

centric governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang berpusat pada integrasi dan pemanfaatan data. Implementasi *Single Identity Number* melalui NIK menjadi fondasi utama dalam upaya menciptakan sistem administrasi yang terintegrasi secara nasional. Digitalisasi layanan DUKCAPIL, termasuk pengembangan identitas kependudukan digital, mencerminkan pergeseran dari birokrasi manual menuju sistem berbasis algoritma dan data.

Dalam kerangka ini, biopolitik tidak lagi hanya beroperasi melalui pencatatan populasi, tetapi melalui pengelolaan populasi digital yang memungkinkan negara untuk memantau, mengklasifikasi, dan mengatur warga secara *real-time*. Otoritas yang sebelumnya berada pada aparatur birokrasi kini bertransformasi ke dalam sistem algoritmik yang menentukan validitas data dan kelayakan akses. Implikasinya adalah terbentuknya relasi negara–warga yang baru, di mana negara hadir secara “mahahadir” melalui sistem digital, sementara warga direpresentasikan sebagai entitas data yang harus selalu diperbarui agar tetap diakui.

Peralihan menuju *data-centric governance* di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemajuan teknologi administratif, melainkan sebagai transformasi fundamental dalam kontrak sosial antara negara dan warga. Negara kini memiliki kapasitas untuk menentukan validitas keberadaan warga dan akses terhadap hak melalui mekanisme data yang terintegrasi. Dalam situasi ini,

muncul pertanyaan kritis mengenai batas-batas kekuasaan administratif: sejauh mana keadilan dapat dijamin ketika keputusan-keputusan sosial semakin bergantung pada validitas data dan proses algoritmik? Pertanyaan ini menegaskan bahwa di balik efisiensi dan rasionalitas sistem, terdapat tantangan mendasar dalam menjaga dimensi kemanusiaan dalam praktik pemerintahan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif teknis, melainkan sebagai instrumen biopolitik yang memungkinkan negara mengelola kehidupan populasi melalui pencatatan, klasifikasi, dan integrasi data. Dalam perspektif Michel Foucault, praktik administrasi kependudukan melalui DUKCAPIL Kota Bandung merepresentasikan transformasi kekuasaan modern dari bentuk koersif menuju bentuk yang lebih halus, teknokratis, dan berbasis data. Melalui NIK, KTP-el, dan sistem digital terintegrasi, negara tidak hanya mengidentifikasi warga, tetapi juga menentukan validitas eksistensi administratif mereka. Dengan demikian, keberadaan warga dalam negara modern semakin bergantung pada keterdaftaran dan validitas data di dalam sistem pemerintahan.

Hasil pembahasan juga memperlihatkan bahwa relasi negara–warga mengalami rekonstruksi mendasar dalam era digital governance. Negara tidak lagi mengendalikan

warga melalui paksaan langsung, melainkan melalui mekanisme akses, integrasi layanan, dan pengelolaan data yang mendorong warga untuk secara sukarela menyesuaikan diri dengan standar administratif negara. Dalam konteks Kota Bandung sebagai laboratorium smart city, digitalisasi administrasi kependudukan memperkuat bentuk governmentality, di mana kepatuhan administratif diinternalisasi sebagai kebutuhan sosial untuk memperoleh layanan publik. Akibatnya, relasi kekuasaan menjadi semakin tidak kasat mata, tetapi tetap efektif dalam membentuk perilaku dan ketergantungan warga terhadap sistem negara.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa praktik biopolitik dalam administrasi kependudukan membawa implikasi konseptual yang signifikan terhadap pemahaman kewarganegaraan dan subjektivitas warga. Kewarganegaraan bergeser dari sekadar status hukum menjadi konstruksi administratif yang bergantung pada validitas data, sementara hak-hak warga berubah menjadi hak yang bersyarat secara administratif. Dalam kondisi ini, individu yang tidak terdata atau tidak tervalidasi berpotensi mengalami eksklusi sosial dan administratif. Selain itu, warga negara mengalami transformasi menjadi "administrative subject" atau "data subject", yaitu individu yang dikenali dan diakui melalui representasi digitalnya dalam sistem negara.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan menuju data-centric governance di

Indonesia menghadirkan paradoks antara efisiensi pelayanan publik dan penguatan kontrol negara terhadap kehidupan warga. Digitalisasi administrasi kependudukan memang membuka peluang bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan terintegrasi, namun di saat yang sama juga memperluas kapasitas negara dalam memantau, mengklasifikasi, dan mengatur populasi secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan refleksi kritis terhadap batas-batas kekuasaan administratif di era digital agar transformasi pemerintahan berbasis data tidak mengabaikan dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, privasi, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam masyarakat demokratis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Haramain, M. (2026). *Metodologi Penelitian Kepustakaan (Literature Review)*.
- Istiqomah, E. R. (2025). Pendekatan Konseptual dalam Memahami Analisis Real untuk Pemula. *Bilangan: Jurnal Ilmiah Matematika, Kebumihan dan Angkasa*, 3(5), 79-89.
- Kusuma, D. (2026). Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Teori Administrasi Negara Modern: Kajian Kepustakaan Kritis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7738-7751.
- Marlina, S. (2025). Analisis literatur sebagai metode penelitian. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, 1(01), 1.

- Nampa, U. (2025). Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Mantikulore. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 105-115.
- Nurhayati, N. A. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, K. A. (2026). Implementasi Administrasi Kependudukan Berbasis Digital di Kantor Kelurahan Kalisegoro. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 49-58.
- Rahmadana, A. R. (2025). Implementasi Governansi Digital Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: Analisis Transformasi Kebijakan Menuju Optimalisasi Bonus Demografi Indonesia. *Advances In Education Journal* , 2(3), 1058-1067.
- Riaji, I. A. (2026). EUFEMISME DALAM BAHASA POLITIK INDONESIA: KAJIAN KONSEPTUAL. *Jurnal Dialektika Politik*, 10(1), 23-33.
- Sabrina, I. S. (2026). Analisis Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data dalam Metodologi Penelitian Tindakan Kelas: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 115-124.
- Septianno, B. H. (2025). Bahasa Sebagai Teknologi Bio-Politik: Analisis Novel 1984 dalam Perspektif Teori Foucault dan Agamben. *Dekonstruksi*, 13-21.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 43.
- Wardhana, I. J. (2024). *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Waruwu, M. (2025). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Yar'Adua, S. M. (2023). Media and national development in democratic societies. *Polit Journal Scientific Journal of Politics*, 3(3), 105-115.